

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sejak zaman dahulu dikenal sebagai Negara agraris, untuk mencukupi keperluan hidupnya sangat bergantung pada hasil pertanian. Kehidupan ketika itu masih sangat sederhana, dengan daya pikir dan akal, serta pengalaman-pengalaman warisan leluhur yang masih sangat sederhana (Soetrisno, 1991:11) *dalam* (Khalida, 2009).

Pembangunan pertanian dalam era globalisasi saat ini telah mengalami banyak perubahan dimana pembangunan yang selama ini terkesan berdiri sendiri, selanjutnya lebih mencerminkan keterkaitan yang erat dengan sektor lainnya. Sehubungan dengan hal tersebut salah satu strategi dasar yang ditempuh dalam pembangunan pertanian adalah penerapan pendekatan sosial ekonomi dengan memanfaatkan secara optimal sumber daya pertanian dalam suatu kawasan ekosistem (Sudaryanto, 2001).

Dalam rangka membangun pertanian tangguh para pelaku pembangunan pertanian perlu memiliki kemampuan dalam memanfaatkan segala sumber daya secara optimal, mengatasi segala hambatan dan tantangan, menyesuaikan diri dalam pola dan struktur produksi terhadap perubahan yang terjadi serta berperan aktif dalam pembangunan nasional dan pembangunan wilayah. Untuk mewujudkan pertanian tangguh tersebut diperlukan aparat pertanian yang tangguh dibidang pengaturan, pelayanan dan penyuluhan sesuai kualifikasi dan spesialisasi yang diperlukan bagi kelangsungan proses pembangunan pertanian tangguh tersebut (Soedijanto, 1996) *dalam* (Mangare, 2016).

Agar upaya pembangunan pertanian dapat mencapai sasaran, penyuluh pertanian sebagai ujung tombaknya harus dapat memadukan kebijaksanaan pemerintah (pusat dan daerah) dengan kepentingan dan keinginan petani nelayan beserta keluarganya, perpaduanantara kedua belah pihak tersebut harus dituangkan secara tertulis dalam program penyuluhan pertanian (Djasmun, Ir. 2000) *dalam* (Khalida, 2009).

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006, penyuluhan pertanian merupakan proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar,teknologi,permodalan dan sumber daya lainnya, upaya untuk meningkatkan produktifitas, efesiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Menurut Bryan dan Glenn (2004) *dalam* (Bahua, 2014), terdapat tiga peran utama penyuluh yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan penyuluhan, yaitu: (1) peleburan diri atau bersatu dengan masyarakat sasaran, (2) menggerakkan masyarakat sasaran untuk melakukan perubahan berencana dan (3) memantapkan hubungan sosial dengan masyarakat sasaran.

Tujuan penyuluhan pertanian adalah mengubah perilaku (*behavior*) petani dan anggota keluarganya yaitu mengubah pengetahuan, sikap, serta keterampilannya. Perubahan pengetahuan, sikap dan keterampilan ini akan merupakan “pintu gerbang” terjadinya penghayatan (*characterization, habitually*) dan penerapan (*adopsi*) dari inovasi (pembaharuan) pertanian yang disuluhkan atau yang menjadi misinya. Tanpa terjadi perubahan perilaku

(behavior) ini tidak akan terjadi proses penghayatan atau penerapan dalam diri petani dan anggota keluarganya.

Adapun misi dan pesan penyuluh pertanian mencakup:

1. Bertani lebih baik (*betterfarming*)
2. Berusaha tani lebih menguntungkan (*betterbusiness*)
3. Hidup lebih sejahtera (*betterliving*)
4. Membentuk masyarakat tani yang lebih sejahtera (*bettercommunity*)

(Padmowihardjo, 2001).

Penyuluh pertanian yang sehari-hari berkomunikasi dan berinteraksi dengan peserta didik di pedesaan (yang biasa dikenal dengan nama PPL) berpangkal kerja di Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) dan melancarkan kegiatan penyuluhan pertanian BPP sesuai dengan jabatan fungsional yang dipangkunya (Soedijanto, 1996) *dalam* (Bahua, 2014).

Menurut (Daniel, 2002), di Indonesia pada umumnya penyuluhan pertanian belum dapat dikatakan berhasil. Hal ini dikarenakan jumlah penyuluh yang ada di desa masih belum merata.

Berdasarkan data Kementerian Pertanian RI (2019), jumlah penyuluh pertanian mencapai 72,661 orang, terdiri atas 28,115 orang Penyuluh PNS, 17,009 orang Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL-TBPP) dan 27,537 orang penyuluh swadaya, sedangkan jumlah desa mencapai 82,482desa. Menurut Menteri Pertanian RI Amran Sulaiman (2019) dalam website Kementerian Pertanian RI (2019), jumlah penyuluh pertanian ini belum memenuhi kebutuhan yang ada dan kurang sejalan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang

membutuhkan sekurang-kurangnya satu penyuluh untuk setiap desa. Guna memenuhi kebutuhan tersebut diperlukan tambahan 9,821 Penyuluh Pertanian.

Provinsi Riau adalah provinsi yang memiliki jumlah 1,296 penyuluh, terdiri atas 613 orang Penyuluh PNS, 465 orang Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL-TBPP) dan 218 penyuluh swadaya.

Tabel 1.1 Jumlah Penyuluh Pertanian (PNS, THL, Swadaya) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2019

No	Kabupaten/Kota	Penyuluh PNS	Penyuluh THL	Penyuluh Swadaya	Total (Orang)
1	BPTP	11	0	0	11
2	Provinsi Riau	10	1	0	11
3	Kuantan Singingi	71	46	14	131
4	Indragiri Hulu	53	13	102	168
5	Indragiri Hilir	87	60	0	147
6	Palalawan	57	18	1	76
7	Siak	46	63	28	137
8	Kampar	138	16	9	163
9	Rokan Hulu	53	45	33	131
10	Bengkalis	29	43	0	74
11	Rokan Hilir	22	33	3	68
12	Kepulauan Meranti	3	96	0	99
13	Kota Pekanbaru	16	11	16	43
14	Kota Dumai	17	8	12	37
	Jumlah	613	465	218	1,296

(Sumber: Pusat Penyuluhan Pertanian, BPPSDMP, Kementerian Pertanian, 2019)

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa penyuluh pertanian yang ada di Provinsi Riau tahun 2019 sebanyak 1,296 orang. Kabupaten Rokan Hulu memiliki jumlah penyuluh sebanyak 131 orang, ini menunjukkan bahwa Kabupaten Rokan Hulu memiliki jumlah penyuluh pertanian yang relatif banyak dibandingkan dengan kabupaten lain yang ada di Provinsi Riau. memiliki BPP (Badan Penyuluhan Pertanian) yang berada dibawah Cabang Dinas Pertanian. Jumlah BPP yang dikelola dan di bina Dinas Pertanian Kabupaten Rokan Hulu sebanyak 11 unit. Data penyuluh pertanian yang ada di Kabupaten Rokan Hulu dapat dilihat pada Tabel 1.2 berikut:

Tabel 1.2 Jumlah Penyuluh Pertanian Menurut Kecamatan dan Kelompok Jabatan Fungsional (KJF) di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019

No.	Kab/BPP	Penyuluh			Total (Orang)
		PNS (Orang)	THL (Orang)	Swadaya (Orang)	
1	Rokan Hulu	2	0	0	2
2	Kec. Rambah	1	5	0	6
3	Kec. Rambah Samo	7	7	0	14
4	Kec. Rambah Hilir	4	5	9	18
5	Kec. Bangun Purba	7	3	5	15
6	Kec. Tambusai	1	3	0	4
7	Kec. Tambusai Utara	7	2	5	14
8	Kec. Kepenuhan -Kep Hulu	7	3	5	15
9	Kec. Ujung Batu - Pagaran Tapah	4	3	5	12
10	Kec. Tandun-Kabun	3	3	0	6
11	Kec. Kunto - Bonai Darissalam	6	2	0	8
12	Kec. Rokan - Pendalian IV Koto	6	11	6	23
JUMLAH		53	45	33	131

(Sumber: Pusat Penyuluhan Pertanian, BPPSDMP, Kementerian Pertanian, 2019)

Berdasarkan tabel 1.2 dapat dilihat bahwa Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Rambah Hilir merupakan BPP yang memiliki jumlah penyuluh sebanyak 18 orang, jumlah penyuluh yang PNS sebanyak 4 orang, THBL-TB sebanyak 5 orang dan 9 orang penyuluh swadaya. BPP Kecamatan Rambah Hilir sudah mendapatkan penghargaan sebagai BPP model terbaik di tingkat Kabupaten Rokan Hulu dan Provinsi Riau pada tahun 2017. Tidak hanya itu, BPP Kecamatan Rambah Hilir sudah maju karena salah satu penyuluh yang berada di BPP merupakan seorang penyuluh yang mendapatkan penghargaan PPL terbaik. BPP Kecamatan Rambah Hilir merupakan Balai Penyuluhan Pertanian yang letaknya berada di Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan

Hulu.

Penyuluh pertanian memiliki wilayah binaan dan kelompok tani binaan dalam melaksanakan tugas pokoknya. Data kelompok tani binaan dan wilayah binaan penyuluh pertanian di BPP Kecamatan Rambah Hilir ditunjukkan pada Tabel 1.3 berikut:

Tabel 1.3Kelompok Tani Binaan Dan Wilayah Binaan Penyuluh Pertanian DiBPP Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019

No	Nama Penyuluh	Wilayah Binaan/Desa Binaan	Jumlah Poktan	Jumlah Gapoktan
1	Suparta	-	-	-
2	Eli Sari SP	-	-	-
3	Dedek Kurniawan A.md	1. Sejati	12	2
4	Reflinadi SP	1. Sungai Sitolang	14	14
		2. Lubuk Kerapat	10	7
5	Amrizal	1. Muara Musu	13	8
		2. Rambah Hilir	8	4
6	Febri Irwanto	1. Rambah Muda	24	19
		2. Pasir Jaya	19	23
7	Mardiyono	1. Surombou Indah	12	5
		2. Sungai Dua Indah	9	8
8	Supriya Raharja	1. Pasir Utama	14	13
		2. Rambah	19	12
9	Wahyudi	1. Rambah Hilir Tengah	11	8
		2. Rambah Hilir Timur	14	7

(Sumber: Pusat Penyuluhan Pertanian, BPPSDMP, Kementerian Pertanian,2019)

Tabel 1.3 menunjukkan BPP Kecamatan Rambah Hilir terdiri dari 13 desa sebagai Wilayah Kerja Penyuluhan Pertanian (WKPP), dan 179 kelompok tani dan 120 Gabungan Kelompok Tani. Kepala BPP Kecamatan Rambah Hilir tidak memiliki wilayah binaan, karena kepala BPP sebagai koordinator dalam

melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan di tingkat kecamatan serta melakukan supervisi, monitoring dan evaluasi. Tujuh orang penyuluh pertanian yang ada di BPP masing-masing mendapatkan satu sampai dua WKPP dan 9 – 30 kelompok tani binaan. Jumlah penyuluh yang ada di BPP Kecamatan Rambah Hilir belum sebanding dengan jumlah kelompok tani binaan yang ada. Jumlah tersebut belum sesuai dengan standar rentang kendali penyuluh pertanian menurut Peraturan Menteri Pertanian (2018), yakni seorang penyuluh pertanian idealnya membina 8 – 16 kelompok tani, sehingga efektivitas penyuluhan yang dilaksanakan secara otomatis akan menurun. Hal ini berkaitan dengan kinerja dan tanggung jawab seorang penyuluh. Kinerja ialah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya (Mangkunegara, 2000) *dalam*(Sari, 2017).

Penyuluh pertanian lapangan (PPL) yang diharapkan membawa perubahan yang mendasar disektor pertanian, terutama dalam hal membantu para petani agar mereka mampu menolong diri mereka sendiri dalam usahanya, ternyata belum berfungsi secara optimal seperti yang diharapkan. Berbagai masalah dan hambatan sering kali ditemui PPL, dari masalah pelaksanaan tugas hingga masalah kehidupan pribadi dari PPL. Masalah ini tidak saja menghambat pelaksanaan tugas, tetapi juga dapat berpengaruh terhadap kinerja PPL dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari dilapangan(Khalida, 2009).

Selain masalah diatas, PPL dalam melaksanakan tugasnya dilapangan sering terbentur dengan karakteristik masyarakat terhadap inovasi yang disampaikan. Beberapa masyarakat menyambut baik suatu perubahan, tetapi ada juga masyarakat yang justru menentang perubahan yang dilakukan oleh penyuluh. Penyuluh pertanian tentunya juga memiliki karakteristik.

Karakteristik adalah mengacu kepada karakter dan gaya hidup seseorang serta nilai-nilai yang berkembang secara teratur sehingga tingkah laku menjadi lebih konsisten dan mudah di perhatikan. Selain itu, karakteristik merupakan ciri atau karakteristik yang secara alamiah melekat pada diri seseorang yang meliputi umur, jenis kelamin, ras/suku, pengetahuan, agama/kepercayaan dan sebagainya (Vivorit, 2014). Kinerja penyuluh dipengaruhi juga dengan karakteristik yaitu umur, pendidikan, pengalaman, jumlah tanggungan keluarga dan pendapatan (Janis, 2014).

Karakteristik sosial ekonomi penyuluh adalah ciri yang khas yang sesuai dengan perwatakan sosial ekonomi penyuluh tersebut. Sifat ini akan berpengaruh bagi PPL dalam keberhasilannya melaksanakan tugas. Melihat pentingnya peran PPL dalam hal meningkatkan produktifitas tanaman pangan dalam usaha membangun perekonomian rakyat khususnya di Kabupaten Rokan Hulu. Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Hubungan Karakteristik Sosial Ekonomi Penyuluh Terhadap Pelaksanaan Tugas Pokok Penyuluh Pertanian Di Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu”

1.2 Rumusan Masalah

Upaya peningkatan kemampuan petani dapat dilakukan salah satunya dengan melakukan penyuluhan pertanian. Seperti yang telah dijelaskan oleh Van Den Ban (1999) *dalam* (Ardiansyah, 2017), bahwa penyuluhan pertanian bertujuan untuk meningkatkan produksi pertanian yang merupakan tujuan utama dari pembangunan pertanian yang dicapai melalui cara merangsang petani untuk memanfaatkan teknologi produksi modern dan ilmiah yang dikembangkan melalui penelitian. Penyuluhan pertanian menyangkut bidang tugas yang amat luas dan berhubungan dengan administrasi pemerintahan untuk membantu petani melaksanakan manajemen usahatani sebaik-baiknya menuju usahatani yang efisien dan produktif. Tugas penyuluhan pertanian terutama membantu petani agar senantiasa meningkatkan efisiensi usahatani. Bagi petani, penyuluhan adalah suatu kesempatan memperoleh pendidikan di luar sekolah, mereka dapat belajar sambil berbuat.

Guna menggambarkan penyuluhan pertanian secara menyeluruh dan terpadu diperlukan suatu perencanaan secara matang dan terarah. Perencanaan penyuluhan pertanian di tingkat Wilayah Kerja Penyuluhan Pertanian (WKPP) dituangkan dalam Rencana Kerja Penyuluh Pertanian (RKPP), Yang bertujuan untuk mengantisipasi perkembangan teknologi pertanian serta teknologi penyampaian informasi penyuluhan kepada petani. Untuk meningkatkan kemampuan penyuluh pertanian diperlukan peningkatan pengetahuan, keterampilan serta sikap petani yang diasah melalui pelatihan, pendidikan serta pengalaman langsung, sehingga tercipta profesionalisme penyuluh secara baik

yang pada akhirnya akan menjadikan petani lebih sejahtera (Dinas Pertanian,2019).

Meningkatkan kemampuan penyuluh pertanian diperlukan peningkatan pengetahuan, keterampilan serta sikap petani yang diasah melalui pelatihan, pendidikan serta pengalaman langsung, sehingga tercipta profesionalisme penyuluh secara baik yang pada akhirnya akan menjadikan petani lebih sejahtera (Dinas Pertanian, 2019).

Kaitannya dengan program penyuluhan pertanian ini terutama sebagai salah satu usaha untuk mendidik petani di pedesaan, yaitu dengan mengetahui siapa-siapa yang terlibat dalam program ini. Menurut Sastraatmadja (1993)*dalam*(Candra, 2015), orang pertama yang terlibat dalam kegiatan ini adalah para Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) serta petani itu sendiri dan yang tidak terlibat secara langsung adalah semua instansi yang berwenang dari pemerintah.

Kemampuan seorang penyuluh lapangan (PPL) dapat memberikan andil kepada keberhasilan usaha pertanian. Hal ini disebabkan penyuluh lapangan merupakan mediator dalam penyampaian informasi kepada petani di pedesaan. Perkembangan ilmu pengetahuan teknologi dan implementasi berbagai inovasi yang beraneka ragam sangat berkaitan dengan mediator informasi dalam hal ini penyuluh lapangan. Olehnya itu, kemampuan dan keahlian seorang penyuluh dalam penyampaian informasi dapat berbeda-beda. Dengan kata lain karakteristik yang dimiliki akan meghubungani keberhasilan pekerjaannya. Karakteristik dapat didefinisikan watak, sifat yang tetap terus-menerus untuk membedakan seorang dari yang lain yang menjadi ciri khas seseorang. Penyuluh

lapangan selama ini dikenal sebagai orang yang senantiasa berkomunikasi dengan petani dilapangan yang ditugaskan secara khusus oleh pemerintah. Penyuluh lapangan diartikan seseorang yang membantu masyarakat tani melalui proses pendidikan dalam pelaksanaan teknik dan metode berusaha tani untuk meningkatkan produksi agar lebih berhasil dalam upaya meningkatkan pendapatan (Nora, 2013) *dalam* (Candra, 2015).

Penyuluh lapangan memiliki karakteristik yang berbeda beda setiap individunya sehingga dalam menyampaikan informasi kepada petani juga memiliki cara yang berbeda-beda. Menurut (Qalik, 2011) menyatakan bahwa faktor sosial ekonomi yang dapat melihat hubungan karakteristik sosial ekonomi dengan tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas pokok penyuluh pertanian adalah: umur, tingkat pendidikan, lama menjadi penyuluh, tingkat kosmopolitan, memahami bahasa daerah, jumlah tanggungan keluarga, gaji penyuluh, total pendapatan dan jarak tempat tinggal dengan WKPP tempat bertugas. Ternyata tidak semua faktor sosial ekonomi tersebut berhubungan nyata pada keberhasilan pelaksanaan tugas pokok penyuluh pertanian.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana karakteristik sosial ekonomi penyuluh di lokasi penelitian ?
2. Bagaimana pelaksanaan tugas pokok penyuluh pertanian di daerah penelitian ?
3. Bagaimana tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas pokok penyuluh pertanian di daerah penelitian ?

4. Apakah terdapat hubungan antara karakteristik sosial ekonomi penyuluh (umur, tingkat pendidikan, lama menjadi penyuluh, memahami bahasa daerah, jumlah tanggungan keluarga, gaji penyuluh, total pendapatan, tingkat kosmopolitan, jarak tempat tinggal penyuluh dengan WKPP tempat bertugas) dengan keberhasilan tugas pokok penyuluh di daerah penelitian ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Mengetahui karakteristik sosial ekonomi penyuluh di lokasi penelitian.
2. Mengetahui pelaksanaan tugas pokok penyuluh pertanian di daerah penelitian.
3. Mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas pokok penyuluh pertanian di daerah penelitian.
4. Mengetahui apakah terdapat hubungan antara karakteristik sosial ekonomi penyuluh (umur, tingkat pendidikan, lama menjadi penyuluh, memahami bahasa daerah, jumlah tanggungan keluarga, gaji penyuluh, total pendapatan, tingkat kosmopolitan, jarak tempat tinggal penyuluh dengan WKPP tempat bertugas) terhadap keberhasilan tugas pokok penyuluh di daerah penelitian.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Sebagai bahan informasi bagi peneliti dalam mengembangkan wawasan untuk menjadi seorang sarjana.
2. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah dan instansi terkait untuk mengambil kebijakan dalam upaya peningkatan kinerja penyuluhan pertanian.
3. Sebagai bahan referensi dan bahan pembelajaran bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

1.5 Batasan Operasional

1. Daerah penelitian adalah di Kecamatan Rambah Hilir, Kabupaten Rokan Hulu, Propinsi Riau.
2. Objek penelitian adalah Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) di Kecamatan Rambah Hilir dalam wilayah kerja BPP Rambah Hilir, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau.
3. Waktu penelitian adalah Tahun 2019.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi salah satu data pendukung dan acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian ini digunakan rujukan penelitian terdahulu dari (Khalida, 2009), (Qalik, 2011), (Mangare, 2016), (Ardiansyah, 2017) dan (Sari, 2017).

Penelitian pertama dilakukan oleh (Khalida, 2009) dengan judul skripsi “Hubungan Karakteristik Sosial Ekonomi Penyuluh Dengan Pelaksanaan Tugas Pokok Penyuluh Pertanian”, dengan studi kasus di BPP Medan Krio Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara. Daerah penelitian ditentukan secara sengaja (*purposive*) dan pengambilan sampel petani dilakukan secara sensus. Metode analisis data yang digunakan adalah dengan menggunakan metode deskriptif, sedangkan untuk penentuan karakteristik sosial ekonomi di gunakan metode korelasi Rank Spearman. Dari hasil penelitiandiperoleh Tidak terdapat hubungan umur, pendidikan, jumlah tanggungan dan tingkat pendapatan terhadap pelaksanaan tugas pokok penyuluh tetapi lama menjadi penyuluh memiliki hubungan dengan pelaksanaan tugas pokok penyuluh.

Penelitian kedua dilakukan oleh (Qalik, 2011) dengan judul penelitian “Hubungan Karakteristik Sosial Ekonomi Penyuluh Dengan Tingkat Keberhasilan Pelaksanaan Tugas Pokok Penyuluh Pertanian” (Kasus: Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui karakteristik sosial ekonomi penyuluh di lokasi penelitian, mengetahui

pelaksanaan tugas pokok penyuluh pertanian di daerah penelitian, mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas pokok penyuluh pertanian di daerah penelitian, serta mengetahui apakah terdapat hubungan antara karakteristik sosial ekonomi penyuluh (umur, tingkat pendidikan, lama menjadi penyuluh, memahami bahasa daerah, jumlah tanggungan keluarga, total pendapatan, tingkat kosmopolitan, jarak tempat tinggal penyuluh dengan wilayah kerja penyuluhan pertanian tempat bertugas) terhadap keberhasilan tugas pokok penyuluh di daerah penelitian. Daerah penelitian ditentukan secara sengaja (purposive), yakni di Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, dengan pertimbangan bahwa daerah tersebut memiliki jumlah penyuluh paling banyak dan WKPP paling banyak yang dibawah BPP desa Pematang Sijonam. Metode penentuan objek penelitian dalam dalam penelitian ini digunakan metode sensus, yaitu sebesar 19 orang penyuluh. Metode analisis yang digunakan adalah uji Rank korelation method dari Spearman. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan: Tidak terdapat hubungan antara umur, tingkat pendidikan, memahami bahasa daerah, jumlah tanggungan keluarga, total pendapatan penyuluh, tingkat kosmopolitan, jarak tempat tinggal penyuluh, dengan tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas pokok penyuluh pertanian. Terdapat hubungan antara lama menjadi penyuluh dengan tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas pokok penyuluh pertanian.

Penelitian ketiga dilakukan oleh (Mangare, 2016) dengan judul “Analisis Karakteristik Sosial Ekonomi Penyuluh Dengan Pelaksanaan Penyuluhan Di Kabupaten Minahasa” tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan karakteristik tersebut dengan pelaksanaan tugas penyuluh dengan baik. Penelitian ini menggunakan metode survey dalam pengumpulan data terhadap responden

penyuluh dan dianalisis secara deskriptif. Data yang terkumpul disajikan dalam tabel silang antar variabel (pendidikan dan pengalaman) yang diamati dan dianalisis dengan melihat kecenderungan distribusinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor pendidikan tinggi Sarjana (S1) cenderung lebih baik daripada yang bukan Sarjana dalam pelaksanaan tugas. Dilain hal pengalaman lama bertugas dan yang belum lama bertugas menunjukkan kecenderungan yang relatif belum lama bertugas (20 tahun). Sebagai kesimpulan bahwa karakteristik sosial ekonomi berdasarkan latar belakang pendidikan berhubungan dengan pelaksanaan tugas. Semakin tinggi pendidikan penyuluh semakin baik pelaksanaan tugasnya.

Penelitian keempat dilakukan oleh (Ardiansyah, 2017) “Hubungan Karakteristik Sosial Ekonomi Dengan Kinerja Penyuluh Pertanian Lapangan” (Studi Kasus di Kecamatan Pringsewu, Kecamatan Gadingrejo dan Kecamatan Pardasuka, Kabupaten Pringsewu). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik sosial ekonomi penyuluh pertanian lapangan, kinerja penyuluh pertanian lapangan, dan hubungan karakteristik sosial ekonomi dengan kinerja penyuluh pertanian lapangan di Kecamatan Pringsewu, Gadingrejo, dan Pardasuka. Pengumpulan data dilaksanakan pada bulan Mei sampai Agustus 2017. Sampel pada penelitian ini adalah 13 PPL di Kecamatan Pringsewu, Gadingrejo, dan Pardasuka yang dipilih secara acak sederhana. Data dianalisis secara korelasi Rank Spearman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik sosial ekonomi penyuluh pertanian lapangan masuk dalam kategori cukup baik, kinerja penyuluh pertanian lapangan masuk dalam kategori baik, dan faktor gaji penyuluh pertanian lapangan berhubungan nyata dengan kinerja

penyuluhan. Sementara faktor-faktor umur, tingkat pendidikan, lama menjadi penyuluh, tingkat kosmopolitan, jarak tempat tinggal penyuluh dengan WKPP, dan jumlah tanggungan penyuluh tidak berhubungan dengan kinerja penyuluhan.

Penelitian kelima dilakukan oleh (Sari, 2017) dengan judul “Kinerja Penyuluh Pertanian Dalam Melaksanakan Tugas Pokok Penyuluh Pertanian Di Bp3k Kecamatan Banjar Baru Kabupaten Tulang Bawang”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja penyuluh pertanian dalam melaksanakan tugas pokoknya dan faktor-faktor yang berhubungan dengan kinerja penyuluh pertanian dalam melaksanakan tugas pokok penyuluh pertanian di BP3K Kecamatan Banjar Baru. Lokasi penelitian ini dipilih secara sengaja (purposive) di Kecamatan Banjar Baru. Responden pada penelitian ini adalah 7 orang penyuluh dan 75 petani binaan penyuluh. Pengumpulan data penelitian dilaksanakan pada bulan Januari-Februari 2017. Metode penelitian yang digunakan adalah metode survei dengan analisis deskriptif dan menggunakan uji statistik nonparametrik korelasi Rank Spearman untuk menguji hipotesis. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa faktor-faktor yang berhubungan nyata dengan kinerja penyuluh dalam melaksanakan tugas pokok penyuluh pertanian adalah tingkat motivasi penyuluh, pendapatan penyuluh, dan fasilitas kerja, sedangkan faktor-faktor yang tidak berhubungan nyata dengan kinerja penyuluh pertanian dalam melaksanakan tugas pokok penyuluh pertanian adalah jumlah petani binaan penyuluh, sistem penghargaan, dan jarak tempat tinggal dengan wilayah kerja penyuluh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan kinerja penyuluh pertanian dalam melaksanakan tugas pokok penyuluh pertanian di

BP3K Kecamatan Banjar Baru Kabupaten Tulang Bawang termasuk dalam klasifikasi sedang.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Sejarah Penyuluhan Pertanian

Sejarah penyuluhan pertanian berawal pada tahun 1867-1868 *James Situart dai Trinity Collage* untuk pertama kalinya memberikan ceramah atau pengarahan kepada wanita dan pekerja pria di Inggris Utara, sejak itu di *stuart* dianggap sebagai bapak penyuluhan. Kemudian pada tahun 1871 *stuart* mengusulkan pada *University Cambe Ridge* agar penyuluh masuk kemata kuliah, secara resmi pada tahun 1873 *University Cambe Ridge* menerapkan sistem penyuluhan, yang diikuti oleh *University London* dan *Universitas Oxford*. Menjelang tahun 1880 kegiatan yang mulanya dilakukan di area kampus telah melebar ke luar kampus. Sejak abad 20 istilah penyuluhan pertanian mulai digunakan di Amerika Serikat (Van Den Ban 2012) *dalam* (Rozaini, 2018).

Pertanian di Indonesia telah mempunyai sejarah yang cukup panjang, yang dimulai sejak awal abad 20 dimasa penjajahan. Penyuluhan bermula dari adanya kebutuhan untuk meningkatkan hasil pertanian, baik untuk kepentingan penjajah maupun untuk mencukupi kebutuhan pribumi. Penyuluhan dilandasi pula oleh kenyataan adanya kesenjangan yang cukup jauh antara praktek-praktek yang dilakukan para petani disatu pihak dan adanya teknologi- teknologi yang lebih maju di lain pihak. Kebutuhan peningkatan produksi pertanian diperhitungkan akan dapat dipenuhi seandainya teknologi-teknologi maju yang ditemukan oleh para ahli dapat dipraktekkan oleh para petani sebagai produsen primer

(Margono,2003)

2.2.2 Pengertian Penyuluhan Pertanian

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006, penyuluhan pertanian merupakan proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar,teknologi,permodalan dan sumber daya lainnya, upaya untuk meningkatkan produktifitas, efesiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Secara harfiah penyuluhan berasal dari kata suluh yang berarti obor ataupun alat untuk menerangi keadaan yang gelap. Van Den Ban dan Hawkins (1999)*dalam* (Bahua, 2014), menjelaskan bahwa penyuluhan pertanian merupakan proses: (1) membantu petani menganalisis situasi yang sedang dihadapi dan melakukan perkiraan ke depan; (2) membantu petani menyadarkan terhadap kemungkinan timbulnya masalah dari analisis tersebut; (3) meningkatkan pengetahuan dan mengembangkan wawasan terhadap suatu masalah, serta membantu menyusun kerangka berdasarkan pengetahuan yang dimiliki petani; (4) membantu petani memperoleh pengetahuan yang khusus berkaitan dengan cara pemecahan masalah yang dihadapi serta akibat yang ditimbulkannya sehingga mereka mempunyai berbagai alternatif tindakan; (5) membantu petani memutuskan pilihan yang tepat yang menurut pendapat mereka sudah optimal; (6) meningkatkan motivasi petani untuk dapat menerapkan pilihannya; dan (7) membantu petani untuk mengevaluasi dan meningkatkan keterampilan mereka dalam membentuk pendapat dan mengambil keputusan.

Berikut ini beberapa pendapat mengenai pengertian penyuluhan pertanian menurut para ahli:

- a. Menurut Van den Ban dan Hawkins (1999) *dalam* (Ardiansyah, 2017), penyuluhan merupakan keterlibatan seseorang untuk melakukan komunikasi informasi secara sadar dengan tujuan membantu sesamanya memberikan pendapat sehingga bisa membuat keputusan yang benar. Penyuluhan yang dibahas pada penelitian ini adalah penyuluhan pertanian, sehingga komunikasi informasi yang dilakukan adalah komunikasi bagi masyarakat pertanian dengan tujuan meningkatkan kemampuan para petani..
- b. Penyuluh pertanian adalah orang yang mengemban tugas memberikan dorongan kepada petani agar mau mengubah cara berpikir, cara kerja dan cara hidupnya yang lama dengan cara-cara baru yang lebih sesuai dengan perkembangan zaman dan perkembangan teknologi pertanian yang lebih maju (Kartasapoetra, 1994) *dalam* (Sari, 2017).
- c. Penyuluhan pertanian merupakan pendidikan non formal bagi petani yang meliputi kegiatan dalam ahli pengetahuan dan keterampilan dari penyuluh kepada petani dan keluarganya yang berlangsung melalui proses belajar mengajar (Mardikanto, 2009).

2.2.3 Peran Penyuluh Pertanian

Pengertian peranan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu bagian yang dimainkan oleh suatu individu dalam sebuah peristiwa. Disamping itu, menurut Lubis (2009:29) *dalam* (Resischa, 2016) Peranan adalah suatu kompleks harapan manusia terhadap individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu berdasarkan status dan fungsi sosialnya.

Kartasapoetra (1994) *dalam* (Qalik, 2011) menjelaskan tentang peran penyuluh yang sangat penting bagi terwujudnya pembangunan pertanian modern, yaitu pembangunan pertanian berbasis rakyat. Peran penyuluh tersebut adalah: 1. Sebagai peneliti; mencari masukan terkait dengan ilmu dan teknologi, penyuluh menyampaikan, mendorong, mengarahkan dan membimbing petani mengubah kegiatan usahataniya dengan memanfaatkan ilmu dan teknologi. 2. Sebagai pendidik; meningkatkan pengetahuan untuk memberikan informasi kepada petani, penyuluh harus menimbulkan semangat dan kegairahan kerja para petani agar dapat mengelola usahataniya secara lebih efektif, efisien, dan ekonomis. 3. Sebagai penyuluh; menimbulkan sikap keterbukaan bukan paksaan, penyuluh berperan serta dalam meningkatkan tingkat kesejahteraan hidup para petani beserta keluarganya. Dapat dilihat bahwa peran penyuluh sangat berat, mengharuskannya memiliki kemampuan tinggi, Oleh karena itu, kualitas dari penyuluh harus terus ditingkatkan sehingga mampu berperan dalam memberikan penyuluhan dan mewujudkan pembangunan pertanian.

Undang Undang No. 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluh Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan pasal 4 merinci fungsi (peran) sistem penyuluh sebagai berikut: a. Memfasilitasi proses pembelajaran pelaku utama dan pelaku usaha; b. Mengupayakan kemudahan akses pelaku utama dan pelaku usaha kesumber informasi, teknologi dan sumber daya lainnya agar mereka dapat mengembangkan usahanya; c. Meningkatkan kemampuan kepemimpinan, manajerial, dan kewirausahaan pelaku utama dan pelaku usaha; d. Membantu pelaku utama dan pelaku usaha dalam menumbuh kembangkan organisasinya menjadi organisasi ekonomi yang berdaya saing tinggi, produktif, menerapkan tata kelola berusaha

yang baik dan berkelanjutan; e. Membantu menganalisis dan memecahkan masalah serta merespon peluang dan tantangan yang dihadapi pelaku utama dan pelaku usaha dalam mengelola usaha; f. Menumbuhkan kesadaran pelaku utama dan pelaku usaha terhadap kelestarian fungsi lingkungan; dan g. Melembagakan nilai-nilai budaya pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan yang maju dan modern bagi pelaku utama secara berkelanjutan.

2.2.4 Tujuan Penyuluhan Pertanian

Menurut Kartasapoetra (1994) *dalam* (Bahua, 2014), tujuan penyuluhan pertanian dibedakan menjadi 2 yaitu; 1. Tujuan jangka pendek, yaitu menimbulkan dan merubah pengetahuan, kecakapan, sikap dan bentuk tindakan petani serta merubah sifat petani yang pasif dan statis menjadi aktif dan dinamis. 2. Tujuan jangka panjang, yaitu meningkatkan taraf hidup masyarakat tani atau agar kesejahteraan hidup petani lebih terjamin.

Menurut Mardikanto (1993) *dalam* (Bahua, 2014), tujuan penyuluhan berdasarkan tingkatannya meliputi : 1). Tujuan dasar atau tujuan akhir yang seharusnya terjadi di dalam masyarakat, yaitu tercapainya kesejahteraan masyarakat; 2). Tujuan umum, seperti perubahan sikap, ketrampilan, dan pengetahuan demi meningkatkan produksi dan pendapatan petani; 3). Tujuan pedoman, yaitu arah tujuan dari kegiatan penyuluhan itu sendiri.

Dipertegasakan berdasarkan menurut rumusan UU No.16/2006 tentang Sistem Penyuluh Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (SP3K) pasal 3 tujuan penyuluh pertanian berupa:

1. Memperkuat pengembangan pertanian, perikanan, serta kehutanan yang maju dan modern dalam sistem pembangunan yang berkelanjutan,

2. Memberdayakan pelaku utama dan pelaku usaha dalam peningkatan kemampuan melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif, penumbuhan motivasi, pengembangan potensi, pemberian peluang, peningkatan kesadaran, dan pendampingan serta fasilitasi,
3. Memberikan kepastian hukum bagi terselenggaranya penyuluh yang produktif, efektif, efisien, terdesentralisasi, partisipatif, terbuka, berswadaya, bermitra sejajar, kesetaraan gender, berwawasan luas ke depan, berwawasan lingkungan, dan bertanggung gugat yang dapat menjamin terlaksananya pembangunan pertanian, perikanan, dan kehutanan
4. Memberikan perlindungan, keadilan, dan kepastian hukum bagi pelaku utama dan pelaku usaha untuk mendapatkan pelayanan penyuluh serta bagi penyuluh dalam melaksanakan penyuluh,
5. Mengembangkan sumber daya manusia, yang maju dan sejahtera, sebagai pelaku dan sasaran utama pembangunan pertanian, perikanan, dan kehutanan.

2.2.5 Fungsi Penyuluhan Pertanian

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006, yang tertuang dalam BAB II Pasal 4, fungsi sistem penyuluhan pertanian meliputi: 1) Memfasilitasi proses pembelajaran dari penyuluh kepada sasaran; 2) Mengupayakan kemudahan akses bagi penyuluh dan sasaran terhadap sumber informasi, teknologi dan sumber daya yang ada, agar sasaran dapat mengembangkan usahanya; 3). Meningkatkan kemampuan kepemimpinan, 7 manajerial, organisasi dan kewirausahaan bagi para penyuluh dan sasaran dan 4) Membantu menganalisis dan memecahkan masalah serta merespon peluang dan tantangan yang dihadapi pelaku penyuluhan.

Mardikanto (1993) *dalam* (Bahua, 2014) menyatakan bahwa, secara garis besar fungsi penyuluhan pertanian merupakan suatu kegiatan untuk menambah kesanggupan bagi para petani dalam usaha memperoleh hasil yang dapat memenuhi kebutuhan, menambah pengetahuan dan ketrampilan, memperbaiki cara hidup, perubahan perilaku dan sikap yang lebih baik demi meningkatkan penghasilan dan taraf hidup mereka.

Menurut Isbandi (2005), proses pendidikan non formal (penyuluhan) memiliki beberapa fungsi diantaranya : 1) Sebagai sarana atau wadah penyebaran inovasi baru; 2) Media penghubung antara lembaga penelitian, pemerintah dan penerima; 3) Menterjemahkan inovasi atau gagasan ide baru ke dalam bahasa yang mudah diserap dan dipahami; 4) Mengubah perilaku lama menjadi perilaku baru dan 5) Melaksanakan kegiatan pendidikan dan proses pembelajaran dengan cara-cara tertentu yang disesuaikan dengan kondisi keadaan pelaku penyuluhan.

2.2.6 Tugas Penyuluh Pertanian

Tugas pokok penyuluh pertanian adalah melakukan kegiatan penyuluhan pertanian untuk mengembangkan kemampuan petani dalam menguasai, memanfaatkan dan menerapkan teknologi baru sehingga mampu bertani lebih baik, berusaha lebih menguntungkan serta membina kehidupan berkeluarga yang lebih sejahtera. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 adalah :

1. Menyelenggarakan kunjungan secara berkesinambungan kepada kelompok tani sesuai sistem kerja LAKU
2. Menyelenggarakan penyuluhan pertanian dengan materi yang terpadu, mendinamisasikan kelompok tani dengan pendekatan kelompok
3. Menyusun bersama program penyuluhan di Balai Penyuluhan dan

melaksanakan kegiatan penyuluhan dengan mengikut sertakan tokoh masyarakat

4. Memanfaatkan metode penyuluhan dan memantapkan system kerja LAKU (antara lain: demonstrasi demonstrasi Sipedes, kursus kursus tani desa)
5. Bersama sama dengan kontak tani dan tokoh tokoh masyarakat menyelenggarakan gerakan massal di wilayah kerja (antara lain : pemberantasan hama, gotong royong, dan sebagainya)
6. Menyusun rencana kerja di tingkat WKPP
7. Membantu menyusun RDK/ RDKK kelompok
8. Membantu menyusun administrasi kelompok
9. Melaksanakan tugas lain yang dibebankan oleh kepala Bapelluh

(Departemen Pertanian, 2019).

2.2.7 Keberhasilan Penyuluhan Pertanian

Menurut (Qalik, 2011), faktor yang mempengaruhi keberhasilan penyuluhan adalah karakteristik penyuluh yang terdiri dari faktor sosial dan faktorekonomi. Faktor sosial terdiri dari umur, tingkat pendidikan, lama menjadi penyuluh, tingkat kosmopolitan dan memahami bahasa daerah. Faktor ekonomi terdiri dari jumlah tanggungan keluarga, gaji penyuluh, total pendapatan dan jarak tempat tinggal penyuluh dengan WKPP tempat bertugas adalah bagian yang dapat diukur dari penyuluh pertanian.

2.2.8 Faktor Sosial Ekonomi Penyuluhan Pertanian

Penyuluh pertanian merupakan pendidikan non formal yang ditujukan kepada petani beserta keluarganya yang hidup di pedesaan dengan membawa dua

tujuan utama yang diharapkannya. Tujuan jangka pendek adalah menciptakan perubahan perilaku termasuk di dalamnya sikap, tindakan dan pengetahuan, serta untuk tujuan jangka panjang adalah menciptakan kesejahteraan masyarakat dengan jalan meningkatkan taraf hidup mereka (Sastraatmadja, 1993) *dalam* (Vivorit, 2014). Penyuluh mempunyai beberapa faktor sosial dan faktor ekonomi yang mempengaruhinya:

1. Faktor Sosial

a. Umur

Umur merupakan salah satu faktor utama yang mempengaruhi efisiensi belajar, karena akan berpengaruh terhadap minatnya pada macam pekerjaan tertentu sehingga umur seseorang juga akan berpengaruh terhadap motivasinya untuk belajar. Bertambahnya umur seseorang akan menumpuk pengalaman-pengalamannya yang merupakan sumberdaya yang sangat berguna bagi kesiapannya untuk belajar lebih lanjut (Mardikanto, 2009).

Umur pada umumnya sangat berpengaruh terhadap aktivitas sehari-hari. Tenaga kerja dalam usia yang sangat produktif (22-65 tahun) memiliki potensi kerja yang masih produktif. Anonimous (1991: 45) *dalam* (Khalida, 2009).

b. Tingkat Pendidikan

Penempatan seorang penyuluh sangat di tentukan oleh pendidikan yang dimilikinya, pendidikan juga sangat berpengaruh pada perilaku seorang PPL. Tetapi jika didalam memilih penyuluh ini terlalu ditekankan pada kualitas akademis, maka hal ini akan dapat menyebabkan kesulitan dikemudian hari karena seorang penyuluh yang memiliki pendidikan yang

tinggi belum tentu memiliki kemampuan menyuluh yang baik. (Suhardiyono, 1992) *dalam* (Qalik, 2011).

c. Lama Menjadi Penyuluh

Orang-orang yang lama berada pada suatu pekerjaan akan lebih produktif daripada mereka yang senioritasnya lebih rendah. (Suhardiyono, 1992) *dalam* (Vivorit, 2014).

d. Tingkat Kosmopolitan

Tingkat kosmopolitan dapat diketahui dengan melihat frekuensi seseorang keluar dari desanya ke desa lain atau ke kota, koran yang dibaca, siaran TV yang ditonton, dan siaran radio yang didengar (Mosher, 1997) *dalam* (Qalik, 2011).

e. Memahami Bahasa Daerah

Memahami bahasa daerah di tempat penyuluh bertugas akan memudahkan penyuluh dalam berkomunikasi. Menggunakan bahasa daerah juga akan dapat meningkatkan tingkat adopsi petani, karena penggunaan bahasa yang sama akan lebih mendapatkan kepercayaan (Qalik, 2011).

2. Faktor Ekonomi

a. Jumlah Tanggungan Keluarga

Jumlah tanggungan keluarga sering menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk menerima inovasi. Konsekuensi penerimaan inovasi akan berpengaruh terhadap sistem keluarga, dimulai dari anak-anak, istri dan anggota keluarga lainnya. Semakin besar jumlah anggota keluarga akan semakin besar pula tuntutan kebutuhan keuangan rumah tangga. Kegagalan penyuluh dalam penyuluhan pertanian akan berpengaruh terhadap

pemenuhan kebutuhan keluarga (Soekartawi, 1988: 32) *dalam* (Khalida, 2009).

b. Gaji Penyuluh

Gaji penyuluh merupakan pendapatan penyuluh pertanian dari pekerjaan sebagai penyuluh, penyuluh yang telah diangkat menjadi pegawai negeri ataupun tenaga harian lepas (Qalik, 2011).

c. Total Pendapatan

Meningkatnya pendapatan maka meningkat pula pengeluaran untuk keperluan rumah tangga dan pembentukan modal. Menurunnya pendapatan akan menurunkan pula pengeluaran untuk konsumsi dan modal. (Tohir, 1991: 187) *dalam* (Khalida, 2009).

d. Jarak tempat tinggal penyuluh dengan WKPP tempat bertugas

Tempat tinggal penyuluh yang terlalu jauh dengan WKPP tempat penyuluh bertugas bisa menjadi penyebab penyuluh tidak mengetahui masalah masalah yang dihadapi petani, karena petani tidak bisa menceritakan masalahnya kepada penyuluh. Selain itu, penyuluh juga akan mengeluarkan biaya yang lebih besar jika jarak tempat tinggal penyuluh dengan WKPP tempat penyuluh bertugas terlalu jauh, dan dapat menyebabkan keterlambatan hadir penyuluh(Qalik, 2011).

Tempat tinggal penyuluh yang terlalu jauh dengan Wilayah Kerja Penyuluh Pertanian (WKPP) tempat penyuluh bertugas bisa menjadi penyebab penyuluh tidak mengetahui masalah-masalah yang dihadapi petani, karena petani tidak bisa menceritakan masalahnya kepada penyuluh. Selain itu, penyuluh juga mengeluarkan biaya yang lebih besar jika jarak tempat

tinggal penyuluh dengan WKPP tempat penyuluh bertugas terlalu jauh, dan dapat menyebabkan keterlambatan hadir dalam kegiatan penyuluhan (Sari, 2013) *dalam* (Mangare, 2016).

2.3 Kerangka Pemikiran

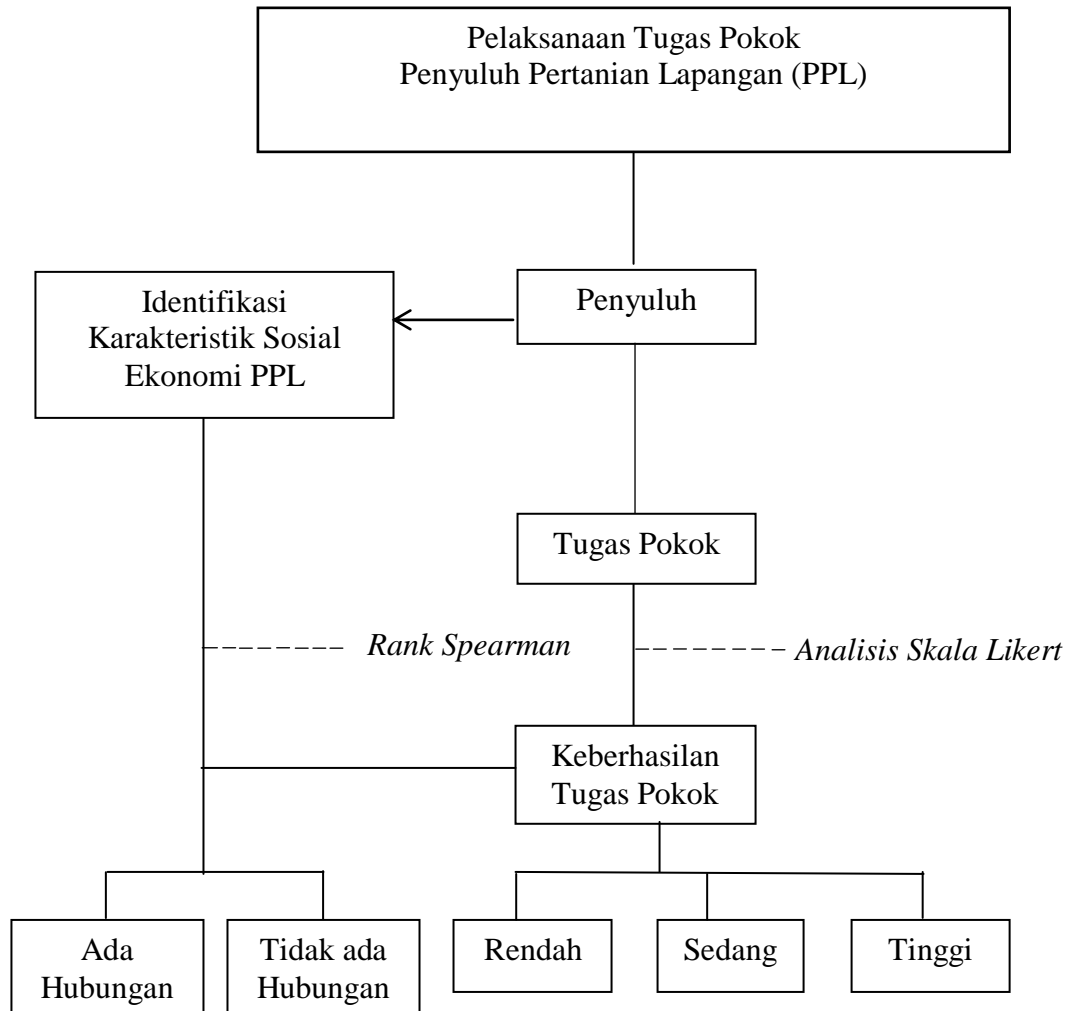
Penyuluhan bermula dari adanya kebutuhan untuk meningkatkan hasil pertanian agar dapat mencukupi kebutuhan pribumi. Penyuluhan dilandasi pula oleh kenyataan adanya kesenjangan yang cukup jauh antara praktek praktek yang dilakukan para petani di satu pihak dan adanya teknologi teknologi yang lebih maju di lain pihak. Kebutuhan peningkatan produksi pertanian diperhitungkan akan dapat dipenuhi seandainya teknologi teknologi maju yang ditemukan oleh para ahli dapat dipraktekkan oleh para petani sebagai produsen primer (Mardikanto, 1992) *dalam* (Qalik, 2011).

Pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian mempunyai beberapa tugas pokok yang harus dilaksanakan. Tugas pokok tersebut dilaksanakan untuk mengembangkan kemampuan petani dalam menguasai, memanfaatkan, dan menerapkan teknologi baru sehingga mampu bertani lebih baik, berusaha tani lebih menguntungkan, hidup lebih sejahtera, dan dapat membentuk masyarakat tani yang lebih sejahtera.

Setiap penyuluh mempunyai beberapa faktor sosial dan faktor ekonomi yang mungkin mempengaruhinya dalam kegiatan penyuluhan pertanian atau pelaksanaan tugas pokok penyuluhan pertanian. Faktor sosial adalah umur, tingkat pendidikan, lama menjadi penyuluh, dan memahami bahasa daerah. Sedangkan

faktor ekonomi adalah jumlah tanggungan keluarga, total pendapatan, tingkat kosmopolitan, dan jarak tempat tinggal penyuluh dengan WKPP tempat bertugas.

SKEMA KERANGKA PEMIKIRAN



Gambar 1. Skema Pemikiran

2.4 Hipotesis Penelitian

1. Ada karakteristik sosial ekonomi penyuluh di lokasi penelitian.
2. Pelaksanaan tugas pokok penyuluh pertanian di Kecamatan Rambah Hilir telah berhasil dengan kriteria tingkat keberhasilan tinggi.
3. Terdapat tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas pokok penyuluh pertanian di daerah penelitian.
4. Terdapat hubungan antara karakteristik sosial ekonomi penyuluh (umur, tingkat pendidikan, lama menjadi penyuluh, memahami bahasa daerah, status kerja penyuluh, jumlah tanggungan keluarga, gaji penyuluh, total pendapatan, jarak tempat tinggal penyuluh dengan WKPP tempat bertugas, pekerjaan lainnya) terhadap keberhasilan tugas pokok penyuluh di Kecamatan Rambah Hilir.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penentuan Daerah Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Rokan Hulu tepatnya di BPP Kecamatan Rambah Hilir. Penentuan lokasi dilakukan secara sengaja (*purposive*) dengan pertimbangan bahwa BPP Kecamatan Rambah Hilir merupakan BPP yang mendapatkan penghargaan sebagai BPP model satu terbaik di tingkat Kabupaten Rokan Hulu dan BPP model dua terbaik di tingkat Provinsi Riau pada tahun 2017. Tidak hanya itu, BPP Kecamatan Rambah Hilir sudah maju karena salah satu penyuluh yang berada di BPP merupakan seorang penyuluh yang mendapatkan penghargaan PPL terbaik di tingkat Kabupaten Rokan Hulu. Pengambilan data dilakukan pada bulan Oktober-Desember 2019.

3.2 Metode Pengambilan Sampel

Penelitian ini menggunakan metode penarikan sampel penuh, yaitu semua populasi dijadikan sampel (*sensus*). Adapun sampel pada penelitian ini sebanyak 7 orang PPL.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Menurut Nazir (2003: 174) *dalam* (Resischa, 2016), pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan, pengumpulan data merupakan suatu proses pengadaan data primer untuk keperluan penelitian. Sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin dicapai maka penelitian ini membutuhkan jenis data dan sumber data.

1. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan data sekunder.

- a. Data Primer Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan secara langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau orang yang bersangkutan langsung yang memerlukannya, pendapat ini dikemukakan oleh Hasan (2002) dalam (Rani, 2013). Data primer diperoleh dari keterangan yang diberikan penyuluh sebagai responden dari hasil observasi, wawancara dan jawaban dari daftar kuisisioner yang telah disiapkan.
- b. Data Sekunder Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui buku-buku, dokumen- dokumen, jurnal-jurnal serta informasi dari lembaga atau instansi yang dapat mendukung berkaitan dengan penelitian ini.

2. Sumber Data

Sumber data yaitu sumber subjek dari tempat mana data bisa didapatkan. Jika peneliti memakai kuisisioner atau wawancara didalam pengumpulan datanya, maka sumber data itu dari responden, yakni orang yang menjawab pertanyaan peneliti, yaitu tertulis ataupun lisan. Sumber data berbentuk responden ini digunakan didalam penelitian. Pengumpulan data primer diperoleh dari penyuluh dan petani responden melalui wawancara dengan menggunakan kuesioner dan pengamatan langsung dilapangan.

- a. Data skunder di ambil langsung dari penyuluh pertanian, seperti Identitas penyuluh PPL yang meliputi: nama, umur, jenis kelamin, pendidikan terakhir, lama menjadi penyuluh, dan laainnya. Sesuai dengan apa yang diperlukan pada penelitian.

- b. Data skunder diperoleh dari literatur yang berasal dari instansi-instansi yang terkait antara lain: Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Rokan Hulu, Kantor Kecamatan Rambah Hilir, Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Rambah Hilir, dan literatur yang terkait.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang dilakukan dalam melakukan pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang dilakukan antara lain adalah:

- a. Observasi, yaitu pengamatan secara langsung. Hal ini dilakukan karena pengamatan secara langsung merupakan teknik yang ampuh untuk mengetes suatu kebenaran karena memungkinkan peneliti untuk melihat dan mengamati sendiri, kemudian mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana yang terjadi pada keadaan sebenarnya. Teknik pengamatan memungkinkan peneliti mampu memahami situasi yang rumit. Dalam kasus-kasus tertentu dimana teknik komunikasi lainnya tidak dimungkinkan, pengamatan dapat menjadi teknik yang sangat bermanfaat (Guba dan Lincoln, 1981) *dalam* (Ardiansyah, 2017).
- b. Wawancara, yaitu suatu komunikasi verbal atau percakapan yang memerlukan kemampuan responden untuk merumuskan buah pikiran serta perasaannya dengan tepat. Kemampuan verbal ini tidak selalu dimiliki oleh semua orang dan antara lain bergantung pada taraf pendidikan, juga sifat masalah dan rumusan pertanyaan yang diajukan (Nasution, 2014).
- c. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden

untuk dijawabnya (Sugiyono, 2004).

- d. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subyek penelitian, namun melalui dokumen (Hasan, 2002). Dokumen yang digunakan dapat berupa buku harian, surat pribadi, laporan, notulen rapat, catatan kasus dalam pekerjaan sosial dan dokumen lainnya.
- e. Kepustakaan, yaitu untuk memperoleh data melalui sumber-sumber bacaan, karya ilmiah, artikel dan penunjang kepustakaan lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini (Ardiansyah, 2017).

3.4 Metode Analisis Data

1. Masalah satu dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan cara menjelaskan karakteristik sosial ekonomi penyuluh pertanian di Kecamatan Rambah Hilir.
2. Masalah dua dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan menjelaskan pelaksanaan tugas-tugas pokok penyuluh pertanian yang dilaksanakan oleh penyuluh di Kecamatan Rambah Hilir.
3. Analisis data untuk masalah tiga digunakan metode pemberian skor (Skala Likert). Tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas pokok penyuluh di Kecamatan Rambah Hilir dilihat dari tingkat partisipasi penyuluh terhadap pelaksanaan tugas pokok penyuluhan pertanian.

Tabel 3.4.1 Uraian Tugas Pokok dan Fungsi

No	Tugas Pokok	Indikator	Skor
1	Menyelenggarakan kunjungan secara berkesinambungan kepada kelompok tani sesuai sistem kerja LAKU	A : 25 – 32 kali kunjungan ke 16kelompok tani dalam sebulan	3
		B : 16 – 24 kali kunjungan ke 16kelompok tani dalam sebulan	2
		C : <16 kali kunjungan ke 16 kelompok tani dalam sebulan	1
2	Menyelenggarakan penyuluhan pertanian dengan materi yang terpadu, mendinamisasikan kelompok tani dengan pendekatan kelompok	A : Selalu	3
		B : Kadang – kadang	2
		C : Tidak pernah	1
3	Menyusun bersama program penyuluhan di Balai Penyuluhan dan melaksanakan kegiatan penyuluhan dengan mengikut sertakan tokoh masyarakat	A : 1 kali dalam setahun	3
		B : 1 kali dalam dua tahun	2
		C : 1 kali dalam ≥ 3 tahun	1
4	Memanfaatkan metode penyuluhan dan memantapkan sistem kerja LAKU (antara lain: demonstrasi-demonstrasi Sipedes, kursus-kursus tani desa)	A : Selalu	3
		B : Kadang – kadang	2
		C : Tidak pernah	1
5	Bersama-sama dengan kontak tani dan tokoh-tokoh masyarakat menyelenggarakan gerakan massal di wilayah kerja (antara lain: pemberantasan hama, gotong royong, dan sebagainya)	A : Selalu	3
		B : Kadang – kadang	2
		C : Tidak pernah	1
6	Menyusun rencana kerja di tingkat WKPP	A: 1 kali dalam setahun	3
		B: 1 kali dalam dua tahun	2
		C: 1 kali dalam >3 tahun	1
7	Membantu menyusun RDK/RDKK kelompok	A: 1 kali dalam setahun	3
		B: 1 kali dalam dua tahun	2
		C: 1 kali dalam >3 tahun	1
8	Membantu menyusun administrasi kelompok	A: 12-16 kelompok tani	3
		B: 6-11 kelompok tani	2
		C: 1-5 kelompok tani	1
9	Melaksanakan tugas lain yang dibebankan oleh Kepala Bapeluh	A : Selalu	3
		B : Kadang – kadang	2
		C : Tidak pernah	1

Sumber: UUD 2006 dan Data diolah

Menurut (Irianto, 2004) untuk mengukur range dari 2 variabel digunakan rumus:

$$\text{Range} = \frac{\text{Data terbesar} - \text{Data terkecil}}{\text{Jumlah Kriteria}}$$

$$\text{Range} = \frac{27 - 9}{3}$$

$$\text{Range} = \frac{18}{3}$$

$$\text{Range} = 6$$

Jumlah skor tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas pokok penyuluhan pertanian antara lain 9 – 27 dengan range 6, sehingga dapat dikategorikan sebagai berikut:

Tabel 3.4.2 Kriteria Keberhasilan Tugas Pokok

No	Interval	Kriteria
1	9 – 15	Tingkat keberhasilan rendah
2	16 – 21	Tingkat keberhasilan sedang
3	22 – 27	Tingkat keberhasilan tinggi

Sumber: Data diolah 2019

4. Masalah empat diuji dengan menggunakan metode korelasi (Rank Korelation Methode) dari Spearman, dengan menggunakan rumus sebagaiberikut:

$$rs = 1 - \frac{6 \sum_{i=1}^N di^2}{N^2 - N} \text{ (Djarwanto, 2003)}$$

Dimana :

Rs = Koefesien Korelasi Sperman

$\sum di^2$ = jumlah kuadrat perbedaan antara karakteristik sosial ekonomipenyuluh dengan pelaksanaan tugas pokok

N =Menunjukkan jumlah pasangan ranking

Kemudian akan diuji dengan menggunakan uji t dengan rumus :

$$t = rs \sqrt{\frac{n-2}{1-rs^2}}$$

dengan uji kriteria sebagai berikut:

Ho diterima apabila $t_{hitung} \leq t_{tabel}$

Artinya tidak ada hubungan antara karakteristik sosial ekonomi penyuluh dengan keberhasilan pelaksanaan tugas pokok penyuluh

Ho ditolak apabila $t_{hitung} \geq t_{tabel}$

Artinya ada hubungan antara karakteristik sosial ekonomi penyuluh dengan keberhasilan pelaksanaan tugas pokok penyuluh

3.5 Defenisi Operasional

1. Tugas pokok penyuluh pertanian adalah melakukan kegiatan penyuluhan pertanian untuk mengembangkan kemampuan petani dalam menguasai, memanfaatkan dan menerapkan teknologi baru sehingga mampu bertani lebih baik, berusaha lebih menguntungkan serta membina kehidupan berkeluarga yang lebih sejahtera.
2. Tugas pokok yang diukur dalam penelitian ini adalah tugas pokok penyuluh di BPP Rambah Hilir, khususnya daerah Kec. Rambah Hilir.
3. Karakteristik adalah ciri khas seseorang yang membedakan antara orang yang satu dengan orang yang lain.
4. Karakteristik sosial adalah suatu ciri yang dilihat dari faktor sosial seorang penyuluh. Pada penelitian ini, karakteristik sosial penyuluh yang akan diteliti adalah:
 - a. Umur

- b. Tingkat pendidikan
 - c. Lama menjadi penyuluh
 - d. Tingkat kosmopolitan
 - e. Memahami bahasa daerah
5. Karakteristik ekonomi adalah suatu ciri yang dilihat dari faktor ekonomi seorang penyuluh. Pada penelitian ini, karakteristik ekonomi penyuluh yang akan diteliti adalah :
- a. Jumlah tanggungan keluarga
 - b. Gaji penyuluh
 - c. Total pendapatan Penyuluh
 - d. Jarak tempat tinggal penyuluh dengan WKPP tempat bertugas.
6. Umur adalah lama waktu hidup penyuluh pada saat dilakukan penelitian (tahun).
7. Tingkat pendidikan adalah jenjang pendidikan formal yang telah ditempuh penyuluh (tahun)
8. Lama menjadi penyuluh adalah lama seorang penyuluh telah bekerja sebagai petugas penyuluh pertanian (tahun).
9. Memahami bahasa daerah adalah memahami dan bisa berkomunikasi dengan bahasa daerah tempat penyuluh bertugas
10. Jumlah tanggungan keluarga adalah jumlah anggota yang belum berpenghasilan dan menjadi tanggung jawab penyuluh (orang)
11. Gaji penyuluh adalah pendapatan penyuluh dari bekerja sebagai penyuluh pertanian (Rp/ Bln).
12. Pendapatan penyuluh adalah jumlah pendapatan dari bekerja sebagai

penyuluh pertanian ditambah dengan pendapatan pekerjaan lainnya di samping sebagai penyuluh (Rp/ Bln).

13. Total pendapatan penyuluh adalah jumlah pendapatan dari bekerja sebagai penyuluh ditambah dengan pekerjaan lain.
14. Tingkat kosmopolitan penyuluh adalah tingkat keterbukaan penyuluh terhadap dunia luar yang dapat meningkatkan pengetahuan umum penyuluh.
15. Jarak tempat tinggal penyuluh dengan WKPP tempat bertugas adalah jarak antara tempat tinggal penyuluh dengan desa/ kelurahan tempat penyuluh tersebut bertugas (WKPP).